



---

---

**Peringatan HUT Ke-68 BPK RI  
Dari Rekomendasi Senilai Rp66,17 T, Baru Rp22,45 T yang Ditindaklanjuti**

***Bandung – Hukum Humas***

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Harry Azhar Azis, menyatakan bahwa salah satu permasalahan efektifitas hasil pemeriksaan BPK adalah belum seluruh rekomendasi temuan BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Dalam lima tahun terakhir yaitu dari 2010 s.d. semester I 2014, BPK telah menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 50,86% atau 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sisanya masih dalam proses tindak lanjut dan ada yang belum ditindaklanjuti”, jelas Harry.

Penjelasan Ketua BPK tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Cornell S. Prawiradiningrat, selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 BPK, yang diselenggarakan di halaman Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kamis, 15 Januari 2015.

Dalam pidato sambutannya, Harry menjelaskan bahwa BPK harus makin mengintensifkan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan entitas yang kita periksa. Jangan sampai rekomendasi yang lalu belum selesai ditindaklanjuti, sudah ada rekomendasi baru yang akan makin menyulitkan pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjutnya.

“Efektifitas pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut dapat memberikan kontribusi bagi pengembalian kerugian negara yang cukup besar, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan. Jika pemantauan tindak lanjut rekomendasi bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal, sudah pasti, akan lebih banyak pengembalian aset dan penyeteroran ke kas negara”, jelas Harry lebih lanjut.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi BPK sejalan dengan himbuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada saat menghadiri Rapat Kerja BPK pada bulan Desember 2014. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintahan, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Selain menjelaskan tentang perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, topik lain yang disampaikan Harry dalam sambutannya adalah tentang peran serta BPK dalam menyejahterakan masyarakat melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ke depan, sejalan dengan Rencana Kerja (Renstra) BPK Tahun 2016 s.d. 2020 yang saat ini sedang disusun, BPK akan memperbanyak pemeriksaan kinerja terutama yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (\*\*\*)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

***Contact Person:***

Novie Irawati Herni Purnama  
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jln. Moch. Toha No.164 Bandung, Jawa Barat  
Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898; e-mail : [humasbpk\\_bdg@yahoo.co.id](mailto:humasbpk_bdg@yahoo.co.id)